

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah . Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran **Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah** Kabupaten Lombok Tengah sangat vital yaitu sebagai stak holders dalam menggali pendapatan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabuppaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati nomor 89 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya Tugas pokok dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Pengkoordinasian penerimaan PAD berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Perencanaan pendapatan daerah, pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah.

Berangkat dari tugas pokok di atas maka sebagai penjabarannya disusun struktur kelembagaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang secara terperinci struktur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah beserta tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis Badan (Renstra) dan Rencana Kerja Badan (Renja);
 - b. Perumusan kebijakan tehnis dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain PAD yang sah yang menjadi kewenangan Badan;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi untuk membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan rencana target, monitoring,dan pengawasan serta pelaporan pemungutan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah dengan SKPD Pengelola;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan Kinerja Badan;
 - e. Penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- f. Penyelenggaraan koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan SKPD dan instansi/lembaga terkait;
- g. Perumusan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi/lembaga pemerintah, LSM dan swasta.
- h. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;
- j. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Badan;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

I.2. Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah . Menurut keadaan sampai bulan Desember 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai Pegawai Negeri sebanyak 114 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 10 orang. Pegawai sejumlah 124 tersebut ditempatkan pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sejumlah 70 orang, pada BKP Kecamatan dan tenaga lapangan yakni Sedahan atau juru pungut PBB sebanyak 63 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

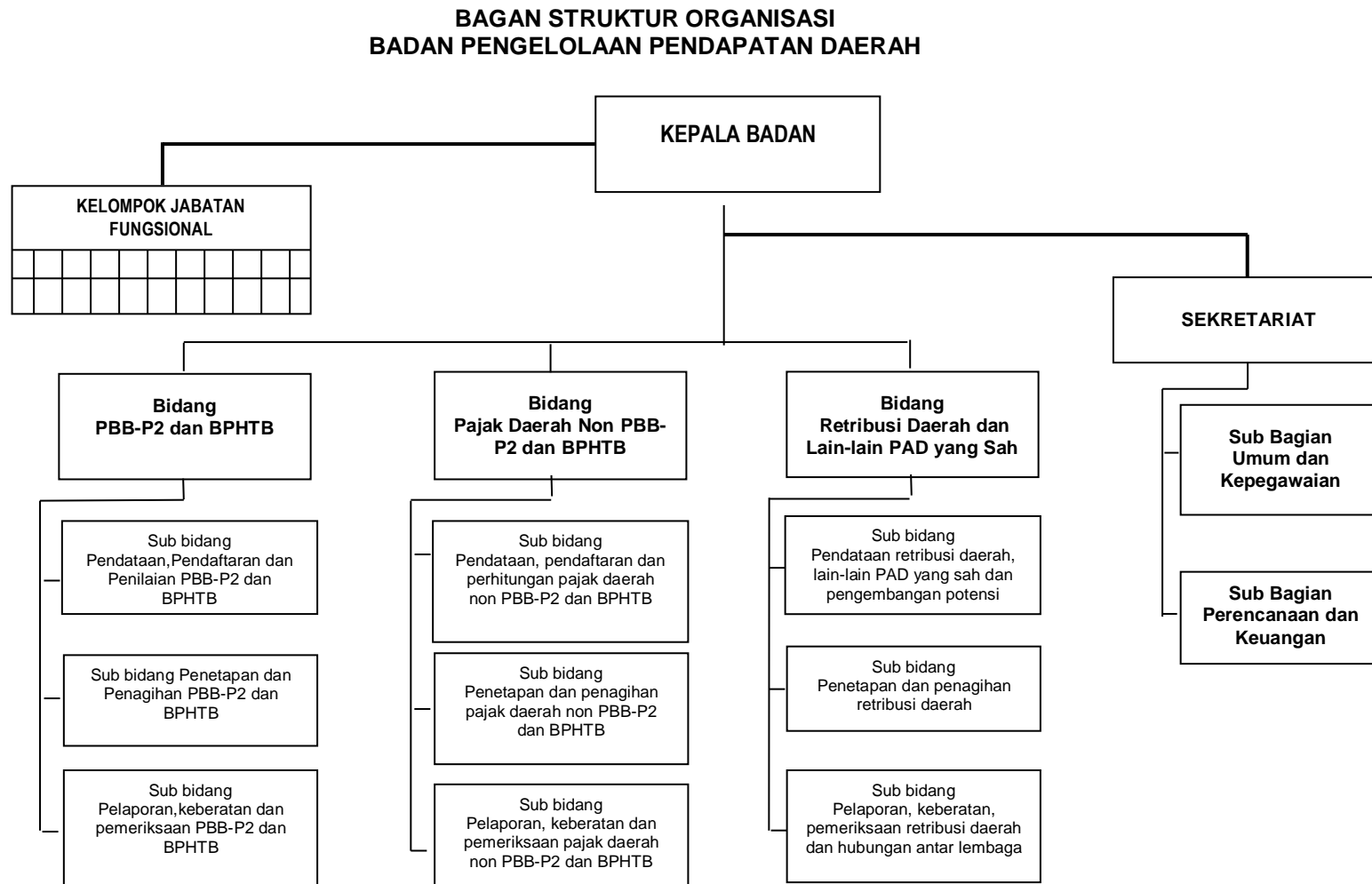
Data Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Keadaan : 31 Desember 2021

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON :	
	a. II.b	1 orang
	b. III.a	1 orang
	c. III.b	3 orang
	d. IV.a	7 orang
	e. IV.b	-

2	JABATAN FUNGSIONAL : a. Analisis Perencana Ahli Muda b. Analisis Kebijakan Umum Ahli Muda	1 Orang 2 Orang
3	PANGKAT/GOLONGAN : a. IV b. III c. II d. I	7 Orang 56 Orang 55 Orang 5 Orang
4	JENJANG PENDIDIKAN : a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. SMA Sederajat f. SD / SLTP	- 1 Orang 46 Orang 5 Orang 56 Orang 5 Orang

Dari data pegawai diatas bahwa dari jenjang pendidikan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah masih membutuhkan Pelatihan tekhnis bagi Sumber Daya Manusia/tenaga pemeriksa pajak akibat hal ini mempengaruhi capaian kinerja OPD pada tahun 2021.

I.3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah



BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Tahun 2021 s.d 2026

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
Meningkatkan kemandirian fiskal		Persentase Capaian Penerimaan PAD	1. Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bapenda. 3. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bapenda. 4. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja Bapenda.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

II.2. Rencana Kerja Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2021
1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Target Penerimaan PAD (%)	232,660,801,437

II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021 – 2026

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	Formulasi Cara Perhitungan	KONDISI SAAT INI 2021	2022	2023	2024	2025	KONDISI AKHIR 2026
1	2	3		4	5	6	7	8
Persentase Capaian Penerimaan PAD	Persentase Kemampuan Kemandirian Fiskal Daerah	Target PAD/Pendapatan x100%	10.58	11.18	12.04	13.00	14.07	15.26
	Pertumbuhan Target Penerimaan PAD (%)	Target PAD Tahun (n) – Target PAD Tahun (n- 1)/Target PAD Tahun (n)x100%	13.96	9.74	7.70	7.97	8.24	8.52

II.4. Perjanjian Kinerja Tahunan SKPD

Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. LALU KARYAWAN, M.Si.**
Jabatan : Kepala Bappenda Kabupaten Lombok Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. MOH. SUHAILI FT.,SH**
Jabatan : Bupati Lombok Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2021

Pihak Kedua,

H. MOH. SUHAILI FT.,SH

Pihak Pertama,

Drs. LALU KARYAWAN, M.Si.
NIP. 196412181994131007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2021	
			TARGET	Rp
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Target Penerimaan PAD (%)	%	13.96	209.339.730.000

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.021.798.066	
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 895.193.200	

Praya, 1 Januari 2021

Bupati Lombok Tengah,



H. MOH. SUHAILI FT.,SH

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. LALU KARYAWAN, M.Si
NIP.196412181994131007

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat kerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus

$$\text{Presentasi pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase pencapaian PAD} &= \frac{153.696.218.654,09}{234.242.471.398,00} \times 100\% \\ &= 65.61\% \end{aligned}$$

Cakupan layanan administrasi perkantoran $100/100 \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka keberhasilan pencapaian kinerja pada realisasi kinerja dalam kisaran 56 s/d 70 sehingga dapat dikategorikan “**KURANG**”.

III.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran SKPD

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penelitian kinerja dengan mengacu pada perubahan perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencaaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi tahun sebelumnya (2020)	Target Akhir Renstra
1	Pertumbuhan Target Penerimaan PAD (%)	Rp	234.242.471.398	153.696.218.654.09	65.61	105.14	6,440,153,190.91
2	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	100	100%	100
Rata-rata					100	100%	

Penjelasan

Pencapaian indikator jumlah realisasi PAD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 dimana pencapaian nya 65.61% dari target Rp. 234.242.471.398. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

BIDANG RETRIBUSI

1. OPD pengelola PAD belum optimal mengelola retribusi
2. Data Objek yang menjadi sumber pendapatan belum disampaikan kepada Bappenda sebagai bahan uji silang kesesuaian antara realisasi pendapatan dengan sumbernya.

3. Perubahan nama retribusi IMB menjadi retribusi PBG melalui UU Cipta Kerja, sehingga Perda tentang IMB tidak dapat digunakan untuk pemungutan

BIDANG PBB DAN NON PBB-P2

1. Gejala Alam Covid-19, penyebabnya karena kurangnya kunjungan wisatawan untuk menginap di hotel/penginapan
2. Kebijakan Pemerintah yang belum sepenuhnya membuka penerbangan luar negeri
3. Dukungan operasional masih belum maksimal khususnya untuk juru pungut (BBM dan Kendaraan)
4. Sarana dan Prasarana belum maksimal dalam penunjang pelayanan.

III. 3. Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis SKPD

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Tahun 2021 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021

Tujuan	Rata-rata Capaian Sasaran	Kreteria Capaian Sasaran	Rata-rata Capain Tujuan	Kriteria Pencapaian Tujuan	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA (2020)
Meningkatkan Kemandirian Fiskal	65.61%	Kurang	10.58 %	Mandiri	9.28 %
	100 %	Baik	100 %	Baik	100 %

III. 4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel III.4a
Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasional	14.198.686.662	12.553.936.214	94,86
2.	Belanja Modal	77.990.000	74.847.003	95,97
	Jumlah :	14.276.676.662	12.628.783.217	95,03

Penyerapan anggaran belanja BAPPENDA 2021 sebesar 95,03% dari anggaran belanja tidak langsung 94,86% dan belanja langsung 95,97%. Dari realisasi anggaran diatas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 95% Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapain kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

Tabel III.4b
Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2021

No.	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	%	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan (Sekretariat/ Bidang/Bagian/ Seksi)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.998.600	21.300.000	96.82	Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.797.853.573	11.227.974.055	87.73	Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
3.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	72.758.960	60.724.460	83.46	Bidang Retribusi Daerah
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.853.129	303.655.325	92.90	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.508.000	103.198.150	78.55	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.623.000	136.178.074	88.07	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
1.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	771.081.400	700.806.150	90.89	Bidang PBB-P2 dan Bidang Non PBB-P2

Berdasarkan data dalam table diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2021 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan teknis yang menangani atau mengelola sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 lalu melaksanakan 2 (dua) program dengan 7 (Tujuh) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.916.991.266 Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan atau mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah merealisasikan penerimaan daerah berdasarkan target yang ditetapkan dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah.

Tujuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat disarikan menjadi 4 (empat) butir yakni:

- Merealisasikan penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Meningkatkan target penerimaan daerah secara bertahap dan kontinyu dari PAD;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- Meningkatkan potensi PAD dengan mencari sumber-sumber PAD baru.

Realisasi keempat butir tujuan tersebut pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 10.437.566.296,87 atau 54,73% dari target sebesar Rp. 19.069.943.137,50

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 153.696.218.654.09 tercapai 65.61 % dari target sebesar Rp. 234.242.471.398

Secara umum target tujuan yang direncanakan sudah dapat tercapai meskipun masih ada yang belum mencapai target. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang merupakan kelemahan dan ancaman. Besaran target PAD pada beberapa sumber tidak realistis menurut potensi sehingga target yang ada sulit tercapai ;

Beberapa kelemahan dan ancaman pada tahun 2021 yaitu;

1. Adanya Bencana Non Alam Covid-19
2. Target masih terdapat potensi obyek-obyek PAD yang belum terinventarisir
3. Kesadaran wajib pajak dan Wajib Retribusi yang masih rendah;
4. Kurangnya sarana dan prasarana terutama Teknologi Informasi yang mempermudah pelayanan Pajak dan Retribusi;
5. Kurang optimalnya operasionalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
6. Penggunaan BILL oleh WP belum optimal
7. Data Base PBB belum akurat
8. Sebagian konsumen menolak membayar pajak
9. Sikap kooperatif WP belum optimal
10. SDM pengelola masih rendah

Sesuai dengan permasalahan di atas maka langkah yang ditempuh oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk memecahkan masalah tersebut adalah :

- Mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber yang potensial untuk menutupi sumber penerimaan yang kurang potensial agar target PAD bisa tercapai;
- Mengintensifkan koordinasi dan pembinaan dengan SKPD pengelola PAD agar motivasi dan kinerja SKPD pengelola PAD dapat meningkat.
- Meninjau ulang NJOP PBB P2 dalam rangka meningkatkan target PAD
- Melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan BILL
- Bekerjasama dengan BPKP Perwakilan NTB melakukan pemeriksaan Pajak

- Memberikan Hadiah dan hukuman

Semoga hasil ini dapat ditingkatkan di masa-masa yang akan datang dan tentunya tanpa bantuan dari semua pihak maka akan sangat mustahil semua target yang telah ditetapkan akan tercapai.

Praya, 18 Januari 2022

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



NIP. 196712311986081001

LAMPIRAN

HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD TAHUN 2021

NO .	SASARAN RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2021	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD	PERJANJIAN KINERJA (PK) SKPD TAHUN 2021	PROGRAM/ KEGIATAN SKPD TAHUN	ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2021
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Kemampuan Kemandirian Fiskal Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	14.276.676.662
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.998.600
				Pertumbuhan Target Penerimaan PAD (%)		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.797.853.573
				Realisasi Penerimaan PAD		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	72.758.960
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.853.129
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.508.000

						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.623.000
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	771.081.400
						Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	771.081.400

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



Dis. JALALUDIN

NIP. 196712311986081001